



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 04 April 2023
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk tingkat kolektabilitas iuran, proses laporan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2022 dan hasil cleansing data kepesertaan BPJS Kesehatan;2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan Tahun 2023, termasuk penjelasan perluasan kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan penguatan program kemitraan.3. Penyampaian hasil pengawasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan dan pelaksanaan jaminan sosial kesehatan Tahun 2022.4. Penyampaian rencana program kerja Dewas BPJS Kesehatan untuk penguatan tugas pokok dan fungsinya sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., MA./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

- Peserta Rapat : A. 38 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI
B. Ketua Dewas BPJS Kesehatan: Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
C. Dirut BPJS Kesehatan: Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc.,Ph.D, AAK

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI Dewan Pengawas BPJS dan Dirut BPJS Kesehatan, dibuka pukul 14.20 WIB., dilaksanakan secara tatap muka, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI diantaranya sebagai berikut:
 - a. membuat terobosan dalam mengatasi peserta non aktif, terutama di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU);
 - b. meningkatkan respon atas keluhan yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan;
 - c. meningkatkan transparansi dan kecepatan proses kredensialing fasilitas kesehatan;
 - d. menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan; dan
 - e. menyiapkan mitigasi risiko terhadap potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk pemenuhan akses terhadap obat, alkes dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan program JKN oleh direksi BPJS Kesehatan, dengan mengintensifkan pengawasan secara langsung ke masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait tindak lanjut BPJS Kesehatan terhadap hasil pengawasan dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan menyampaikan secara tertulis kepada Komisi IX DPR RI paling lambat 18 April 2023:
 - a. penjelasan tindak lanjut yang dilakukan BPJS Kesehatan atas hasil pengawasan dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tahun 2022;

- b. laporan hasil investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2022, termasuk portofolio investasi; dan
- c. rincian penggunaan Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

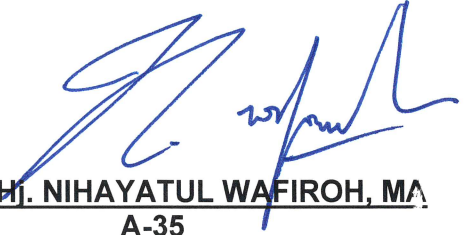
Jakarta, 4 Maret 2023

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN,



Prof. Dr. ABDUL KADIR, Ph.D,Sp.THT-KL(K), MARS.

KETUA RAPAT
KETUA/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA
A-35

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN,



Prof. dr. ALI GUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D., AAK